



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DR. SUGIYANTO
2. Jabatan : KETUA PROGRAM STUDI DIPLOMA EMPAT TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT
3. NHK : 958106

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 744.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 141 m2/80 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 382.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 176 m2/80 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 362.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 200.000.000

1. MOBIL, SUZUKI RW 415 F X-OVER (4X2) A/T Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, HONDA D1B02N26L2 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA A1F02N36M1 A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
4. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 107.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 30.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 46.037.400

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.020.037.400

III. HUTANG Rp. 449.234.660



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

570.802.740

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.